

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu proses perubahan yang berlangsung dengan perencanaan yang tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa di suatu negara disebut pembangunan. Indonesia mengupayakan pertumbuhan pembangunan yang merata secara berkesinambungan dalam memenuhi tujuan nasional yang ditetapkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan yang mengalami kemajuan terdapat pada wilayah perkotaan hal ini dikarenakan pembangunan lebih efisien sebab memiliki besaran penduduk dan per ekonomian wilayah kota kian progresif perkembangannya dibandingkan dengan pedesaan. Pada kenyataannya masih terdapat ketimpangan antara kota dan desa. Penduduk yang miskin di Indonesia menetap di desa dengan situasi tengah terbelakang baik dari segi pembangunan fisik, perekonomian, pendidikan, hingga kesehatan, hal tersebut dapat terlihat dari sulitnya mencari lapangan pekerjaan, minimnya tenaga pendidik yang mau bertugas di desa serta pembangunan fisik yang belum merata sehingga akses yang diperlukan tidak cepat seperti di perkotaan. Dalam menanggapi persoalan tersebut, pemerintah mengambil strategi dengan memberikan perhatian khusus dalam pembangunan di tingkat desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perihal Otonomi Daerah melimpahi amanat dasar bahwa desa mengarah ke *self governing community* yakni suatu daerah yang menata dirinya sendiri dengan memangku

asas *money follow function* dimana permodalan memperturutkan peranan pemerintahan sebagai komitmen dan kewajiban tiap takat pemerintah. ¹ Peran desa menjadi sangat penting, terutama pada proses pelayanan publik. Dengan memberikan otonomi yang besar melalui desentralisasi kebijakan serta dukungan pembiayaan dan fasilitas yang memadai, desa dalam persoalan ini dapat diperkuat untuk menuju kemandirian. kewajiban pemerintah desa sekadar menjadi komponen pengelola daerah yang aktivitasnya mempertimbangkan system atas ke bawah (*top down planning*) maka hal tersebut bersifat sentralistik.²

Pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa atau yang dikatakan sebagai Undang-Undang Desa mendefenisikan bahwa desa bagaikan integrasi masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah dan memiliki wewenang demi menata dan membenahi ihwal pemerintahan, relevansi masyarakat domestik berlandaskan inisiatif masyarakat, kedaulatan dan silsilah, serta kedaulatan kedaerahan yang dibenarkan ataupun dihormati seraya mekanisme NKRI. Menurut undang-undang desa, sebuah desa harus kuat, maju, mandiri, dan demokratis yang dalam hal ini cita-cita yang dimaksud ialah salah satunya dicapai dengan mengendalikan ekspansi dan memberdayakan masyarakat desa. ³

¹ Agus S, Tesis, *Akuntabilitas Pengelolaan ADD*, (Semarang : UNDIP, 2008) Hal, 15.

² Nur'aini. Skripsi : *Efektivitas Pengelolaan DD dalam Pembangunan di Desa Tuananga Kecamatan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat*. (Mataram :UMM, 2021) Hal, 2

³ Yoshua Kevin RH. Skripsi : *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan di Desa Sifaoroasi Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan*. (Medan : Universitas Medan Area, 2021) Hal 3.

Pemerintah desa memperoleh PAD seperti penghasilan usaha desa, partisipan, dan hasil swadaya sejenisnya. Keuangan desa terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Negara atau biasa disebut APBD serta APBN. Dimana Pendapatan yang diperoleh desa dari APBD dikhususkan untuk merealisasikan kegiatan dari pemerintah daerah, sedangkan pendapatan yang didapat dari APBN dikhususkan untuk merealisasikan kegiatan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah desa memiliki kegiatan atau program kerja sendiri, oleh karenanya desa penting membentuk anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes, dengan adanya hal itu segala jenis kegiatan atau pembangunan desa dapat direncanakan sesuai anggaran yang telah didapatkan.⁴

Dana Desa adalah tindakan lanjut dari pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran untuk daerah dan desa di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan di bidang pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Dalam proses pembangunan ini, masyarakat juga dilibatkan.⁵

Kebijakan perolehan DD dan ADD disetiap desa tidaklah serupa jumlahnya melainkan ada perbedaan, di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 150 Desa dari 11 Kecamatan. Dari beberapa kecamatan tersebut salah satunya

⁴ M Fikri Baihaqi Alhamzah. Skripsi : *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa*. (Semarang : UIN Walisongo, 2022) Hal 19.

⁵ Rama Putra Marvianto, dkk. Jurnal Skripsi : *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa*. (Surabaya : UNTAG, 2020) Hal 138.

adalah Kecamatan Bahar Selatan yang terdiri dari 10 Desa didalamnya, dimana setiap tahunnya mendapatkan dana yang telah dialokasikan.

Tabel 1.1 Penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bahar Selatan 2023

No	Desa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Jumlah
1	Adipura Kencana	Rp. 650.331.000;	Rp. 535.550.000;	Rp. 1.185.881.000;
2	Bukit Jaya	Rp. 778.491.000;	Rp. 529.530.000;	Rp. 1.308.021.000;
3	Bukit Subur	Rp. 726.616.000;	Rp. 584.094.000;	Rp. 1.310.710.000;
4	Mekar Jaya	Rp. 645.148.000;	Rp. 466.279.000;	Rp. 1.111.427.000;
5	Tanjung Baru	Rp. 661.065.000;	Rp. 483.527.000;	Rp. 1.144.592.000;
6	Tanjung Lebar	Rp.1.014.154.000;	Rp. 656.789.000;	Rp. 1.670.943.000;
7	Tanjung Mulia	Rp. 770.049.000;	Rp. 560.098.000;	Rp. 1.330.147.000;
8	Tanjung Sari	Rp. 766.844.000;	Rp. 633.310.000;	Rp. 1.400.154.000;
9	Tri Jaya	Rp. 674.965.000;	Rp. 508.586.000;	Rp. 1.183.551.000;
10	Ujung Tanjung	Rp. 712.541.000;	Rp. 494.466.000;	Rp. 1.207.007.000;

Sumber : Website Sistem Informasi Desa Kecamatan Bahar Selatan Tahun 2023

Alokasi tersebut digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan (pelayanan publik), aktualisasi pembangunan desa, pendayagunaan sosial, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana. Pemerintah desa harus mengelola DD secara efektif sehingga tujuan yang telah lebih dulu ditetapkan melalui musyawarah dapat terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan karena seberapa efektif program atau kegiatan suatu organisasi berpengaruh pada hasil yang akan dicapai. Dengan dana desa, pemerintah desa, sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat desa, harus mengelola dan mengaturnya sehingga mereka dapat menjalankan urusan desa

mereka sendiri, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa.

Desa Adipura Kencana ialah salah satu desa yang berada di Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di Kecamatan Bahar Selatan yang mengelola dana desa setiap tahunnya. Sesuai dengan hasil observasi sementara bersama staff desa dijelaskan bahwa dana desa ini ditujukan lebih kepada pembangunan fisik desa seperti pembangunan jalan, Peningkatan sarana/prasarana lapangan volly, usaha tani. Pembangunan non fisik (SDM) meliputi Pelatihan kepala desa, perangkat desa, serta pada bidang pendidikan seperti pelatihan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak (TK), serta dalam aspek layanan kesehatan yang meliputi edukasi kesehatan kelas ibu hamil, parenting, tambahan makanan balita dan sejenisnya.

Tabel 1.2 Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Adipura Kencana 2019-2023

No	Tahun	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Jumlah
1	2019	Rp. 740.847.000;	Rp. 557.800.000;	Rp. 1.298.647.000;
2	2020	Rp. 730.040.000;	Rp. 489.119.000;	Rp. 1.219.159.000;
3	2021	Rp. 742.208.000;	Rp. 454.094.000;	Rp. 1.196.302.000;
4	2022	Rp. 652.588.000;	Rp. 462.518.000;	Rp. 1.115.106.000;
5	2023	Rp. 650.331.000;	Rp. 535.550.000;	Rp. 1.185.881.000;

Pada tahun 2019 berjumlah Rp. 740.847.000 yang direalisasikan untuk kegunaan sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan desa 86,625 Meter
2. Pembangunan jalan desa 105,5 Meter

3. Pembangunan jalan desa 317 Meter
4. Pembangunan jalan usaha tani 280 Meter

Pada tahun 2020 berjumlah Rp. 730.040.000 yang direalisasikan untuk kegunaan sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan desa 420 Meter
2. Pembangunan jalan desa 131 Meter
3. Pembangunan jalan desa 129 Meter
4. Box Mini 4 Meter

Pada tahun 2021 berjumlah Rp. 742.208.000 yang direalisasikan untuk kegunaan sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan desa 52 Meter
2. Pembangunan jalan desa 53 Meter
3. Pembangunan jalan desa 58 Meter
4. Pembangunan jalan desa 124 Meter
5. Pembangunan jalan desa 168 Meter
6. Pembangunan jalan desa 94,5 Meter
7. Pembangunan tower wifi
8. Honorarium guru Paud, TK, dan Madrasah
9. Pelatihan Kepala Desa, Perangkat BPD
10. Pelatihan linmas

Pada tahun 2022 berjumlah Rp. 652.588.000 yang direalisasikan untuk kegunaan sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan usaha tani 60 meter

2. Pembangunan jalan usaha tani 65 meter
3. Pembangunan jalan desa 127 meter
4. Honorarium guru Paud, TK, dan Madrasah
5. Kelas ibu hamil
6. Makanan tambahan balita
7. Pelatihan Kepala Desa, Perangkat BPD
8. Pelatihan PKK

Pada tahun 2023 berjumlah Rp. 650.331.000 dengan perealisasiian untuk kegunaan sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan usaha tani 70 meter
2. Pembangunan jalan usaha tani 92 meter
3. Pembangunan jalan desa 155 meter
4. Pembangunan jalan desa 90 meter
5. Honorarium guru Paud, TK, dan Madrasah
6. Kelas ibu hamil
7. Makanan tambahan balita
8. Kelas *parenting*
9. Pelatihan Kepala Desa, Perangkat BPD
10. Pelatihan linmas

Menurut pengamatan peneliti berdasarkan observasi lapangan sebelumnya Desa Adipura Kencana dipilih sebagai lokasi penelitian adalah karena masih belum optimalnya pembangunan fisik desa seperti jalan yang masih rusak, dan layanan kesehatan yang harusnya perlu ditingkatkan lagi serta

keterlibatan masyarakat yang masih kurang aktif dalam musyawarah dan keterlibatan dalam proses evaluasi tentang dana desa untuk pembangunan. Bukan hal itu saja, desa ini dipilih berdasarkan wilayah tempat tinggal peneliti dimana, peneliti ingin memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pemerintah, serta masih banyak hal yang perlu ditingkatkan terutama pada pembangunan fisik dan non-fisik. Mengingat pembangunan desa harus dilakukan dengan optimal sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses segala lini yang ada.

Persoalan mengenai hal ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan bagi peneliti dimana seperti studi yang dibuat oleh Ardo Rante yang berjudul Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bangkelekila, mengungkapkan bahwa masih kurangnya keterlibatan masyarakat dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, kurang optimalnya pembangunan fisik desa meskipun sudah dilakukan namun tidak mengalami perubahan yang signifikan mengingat anggaran yang ada seharusnya dapat meningkatkan pembangunan termasuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat desa, bukan hanya itu seharusnya berbagai aspek dapat tersentuh, dalam persoalan ini desa tersebut hanya berfokus pada satu titik persoalan saja yaitu pembangunan jalan, padahal dana yang ada diharapkan dapat menyentuh aspek lain seperti layanan pendidikan dan sejenisnya.⁶

⁶ Ardo Rante. Skripsi : *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bangkelekila*. (Makassar : Universitas Bosowa, 2022) Hal 60.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yosua Kevin Rezeki Halawa tidak jauh berbeda dengan penelitian terdahulu sebelumnya, dimana dalam penelitian ini penulis mengungkapkan kurangnya pembangunan jalan di desa dan tidak ada implikasi masyarakat dalam mengevaluasi penerapan anggaran dana desa termaktub. Sumber daya dan kemudahan yang ada di desa tersebut pun dianggap belum mendukung dan perlu perbaikan serta pembangunan yang signifikan agar dapat dirasakan oleh masyarakat desa, belum efektifnya penggunaan dana desa menjadikan pembangunan tidak dapat dirasakan secara baik oleh masyarakat.

Dari kedua penelitian diatas sebagai bahan acuan peneliti saat ini, penelitian tersebut mendapatkan hasil kurang optimal dan kurang efektifnya pembangunan dan pengelolaan dana desa di indonesia ini menjadi permasalahan yang kerap ditemukan di berbagai desa. Permasalahan tersebut terus didapati jika tidak benar-benar di lakukan atau dijalankan dengan optimal mengenai *planning* yang tepat dan strategi yang pas dalam mengelola dana desa.

Oleh karena persoalan termaktub sesuai dengan pemaparan yang di uraikan pada pengamatan dan observasi sementara dimana terlihat masih ada permasalahan yang ada dirasa perlu mendalami persoalan, peneliti dalam hal ini memiliki ketertarikan hendak melakukan penelitian dengan Judul **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA ADIPURA KENCANA PADA TAHUN 2019-2023 KECAMATAN BAHAR SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Setelah pemaparan latar belakang, peneliti merumuskan permasalahan dari penelitian ini meliputi ;

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan?
2. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Di Desa Adipura Kencana ?
3. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Adipura Kencana Ditinjau Dari Indikator : Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi?
4. Apa Saja Hambatan Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian harus dilakukan dengan tujuan tertentu. Karena tujuan berfungsi sebagai sasaran dan tolok ukur. Tujuan dari penelitian ini adalah ;

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan?
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Di Desa Adipura Kencana ?

3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Adipura Kencana Ditinjau Dari Indikator : Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi?
4. Untuk Mengetahui Apa Saja Hambatan Dari Proses Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua (2) jenis manfaat dalam penelitian ini, yaitu ;

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian dipergunakan untuk menambah pemahaman, pandangan, serta memberikan sumbangsih pemikiran guna menambah literature dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam Ilmu Pemerintahan, yang dapat dipergunakan sebagai sebuah referensi untuk pembaharuan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemangku kepentingan terkait, penelitian ini sangat ditujukan menjadi target rekomendasi alternative, akuisisi ataupun suatu asosiasi dalam ikhtiar pengelolaan atau penentuan kebijakan, sehingga dapat menjadi alat monitor bagi pelaksanaan dana desa terkait pembangunan berkelanjutan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses merubah sesuatu menjadi baik, yang berarti memiliki nilai tinggi dari sebelumnya. Melakukan sesuatu dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga bermanfaat juga disebut sebagai penyelenggaraan. Nugroho menyatakan bahwa dalam bidang manajemen, istilah "pengelolaan" digunakan. Secara etimologi, istilah "kelola" (to manage) berasal dari kata "kelola", yang biasanya merujuk pada proses mengelola sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.⁷

Pengelolaan juga memiliki fungsi, dalam persoalan tersebut fungsi memiliki 3 (tiga) aspek utama yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Perencanaan yang merupakan langkah awal dalam pengelolaan melibatkan sebuah proses yang sistematis untuk mempersiapkan kegiatan yang dijalankan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Taufiquokhman Perencanaan adalah kumpulan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Jika ingin mendapatkan hasil yang baik, perencanaan adalah garis besar yang harus diikuti. Pertanyaan pertama saat membuat rencana adalah apa yang ingin dilakukan, harus memikirkan tujuan organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Saat memilih alat untuk mencapai tujuan tersebut, juga harus memikirkan seberapa mungkin tujuan tersebut dapat

⁷ Sumiati, Aris Tri Haryanto. "Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten Ngawi". Jurnal Ilmu Sosial Politik, Vol. 4 No.1 , 2017, Hal 68.

dicapai dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dikaitkan dengan sumberdaya yang muncul sebagai langkah perwujudan rencana.

Pelaksanaan ialah serangkaian kegiatan berawal dari penerapan kebijakan untuk mencapai tujuan. Menurut Adisasmita, pelaksanaan yang berkualitas erat kaitannya dengan pekerjaan yang dikerjakan, memperhatikan keterampilan, kepribadian, serta perilaku pekerja. Sondang P Siagian menyebutkan pelaksanaan selalu melibatkan motivasi bawahan untuk dapat bekerja dengan tekun untuk mencapai sebuah tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis. Dengan demikian pelaksanaan ialah tindakan yang nyata mengikuti rencana yang telah dirancang sebelumnya demi mencapai tujuan yang telah disepakati.⁸

Pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Mc Farland dalam Handayani, pengawasan didefinisikan sebagai "*control is the process by which executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies*". Ada kemungkinan bahwa pengawasan dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki sebuah kesalahan, anomali, ketidaksesuaian, dan penyelewengan yang bertentangan dengan tujuan wewenang yang telah ditetapkan.⁹

⁸ Sondang P Siagian. *Sistem Informasi Manajemen*. (Jakarta : Aksara, 2014) Hal 19

⁹ Rahmawati S, Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*. (Bandung : Cendekia Press, 2020) Hal 3

2. Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal dan usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.¹⁰

Kata "Desa" berasal dari bahasa sansekerta "*deca*", yang berarti "tanah air", "tanah kelahiran", atau "tanah air". Desa atau *village* juga disebut sebagai sekumpulan rumah atau toko di daerah pedesaan, lebih kecil daripada sebuah kota, dalam konteks geografis. Masyarakat desa sangat erat satu sama lain, hal tersebut didasari oleh faktor keturunan maupun karena mereka mempunyai sebuah kepentingan yang sama dalam politik, ekonomi, keamanan, dan sosial. Dimana mereka memiliki struktur pengurus bersama, kekayaan alam tertentu, serta hak dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri.

3. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah sebuah prosedur perubahan yang lebih baik dengan penggunaan metode dan rencana dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian dari proses pembangunan pedesaan terdapat berbagai prinsip dasar yang harus dijalankan guna menyukkseskan pembangunan tersebut. Prinsip-prinsip tersebut meliputi ; (1) Transparansi/Keterbukaan, Partisipatif (2) dapat dinikmati oleh

¹⁰ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm> , Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Diakses pada 30 April 2024 Pukul 16:40 WIB

masyarakat, (3) dapat dipertanggungjawabkan/akuntabilitas serta, (4) Sustainable atau yang disebut juga berkelanjutan.¹¹

Pada dasarnya pembangunan pedesaan adalah dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat, dimana tujuan utama dilakukannya pembangunan ialah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang mengandung tiga nilai penting didalamnya yaitu ; (1) Tercapainya swasembada, yang berarti bahwa sebuah masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, dan keamanan. (2) Peningkatan harga diri, yang berarti membangun keyakinan diri untuk hidup secara mandiri dan tidak bergantung pada atau ditentukan oleh orang lain. (3) Diperolehnya suasana kebebasan, yang berarti bahwa setiap orang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membuat keputusan tentang cara terbaik untuk meningkatkan mutu hidup atau kesejahteraan secara berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat berkembang tanpa takut atau tekanan.¹²

4. Dana Desa

Dana desa didefinisikan dalam Undang-Undang Desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan pada desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

¹¹ Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006)

¹² Rizky A.P, Luluk F. “*Peran Pemerintah Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol 3, No. 1, Hal 53.

pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014, dana desa yang bersumber dari APBN dialokasikan secara adil berdasarkan pengalokasi yang adil. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, negara berkomitmen untuk melindungi dan memberdayakan desa agar kuat, mandiri, maju, dan demokratis. Sebagai bagian dari komitmen ini, dana desa diberikan kepada desa. Dengan dana desa, desa dapat membangun dan berdaya saing dengan masyarakat.¹³

Pada prioritasnya, pelaksanaan dana desa ini lebih kepada pelaksanaan program kegiatan berskala lokal dimana prioritas dana tersebut dialokasikan pada pemenuhan kepentingan dasar, pembangunan fasilitas desa, elaborasi kemampuan perekonomian lokal untuk menaikkan kapabilitas masyarakat di desa dalam perluasan wirausaha, eskalasi penerimaan, beserta ekstensi berskala ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya dana desa ini, kesempatan untuk mencapai kemandirian dalam memajukan pembangunan sangatlah berpeluang besar, dana tersebut juga bukan hanya sekedar sumber pendanaan , tetapi juga merupakan komitmen Negara dalam memperkuat desa sebagai pusat dalam pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan secara merata. Dana desa harus dikelola dengan bijaksana sehingga desa dapat mencapai pembangunan yang berkesinambungan dalam memberdayakan masyarakatnya guna menuju masa depan yang lebih baik.

¹³ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> Diakses Pada 1 Mei 2024, Pukul 13:08 WIB.

5. Alokasi Dana Desa

Tujuan utama dari kebijakan alokasi dana desa kurang lebih sama: memperbaiki praktik pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, layanan, dan bantuan keuangan pada level pemerintahan di bawahnya atau yang disebut desa. Metode pembagian dana desa ini mengubah kebijakan pemerintah kabupaten dari dominan dan sentralis menjadi responsif dan partisipatif, yang dilaksanakan melalui desentralisasi.

Semua kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka oleh seluruh masyarakat desa. ADD merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari sistem bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa sebesar 10%.¹⁴

Tujuan alokasi dana desa dalam UU No 6 Tahun 2014 meliputi;

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.

¹⁴ Faizatul Kharimah dkk. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 2 No. 4, Hal 597-602.

- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).¹⁵

Melalui persoalan tersebut harapannya ialah Kebijakan ADD ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa sebagai bentuk memberdayakan penduduk desa. Dengan adanya pengalokasian, desa memiliki sumber pendanaan yang pasti dan dimungkinkan adanya keberlanjutan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan keuangan pemerintah pusat.

F. Landasan Teori

1. Efektivitas

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris "*Effective*" di mana itu berarti "berhasil" atau "sesuatu yang dilakukan telah tercapai dengan baik." Efektivitas adalah komponen penting dalam mencapai tujuan atau sasaran program. Apabila tujuan dan sasaran program telah tercapai sesuai dengan rencana, program tersebut dianggap efektif.¹⁶

Kata "efektif" dapat berarti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jadi efektivitas adalah adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melakukan tugas dengan sasaran yang dituju. Pada dasarnya, efektivitas

¹⁵ jateng.bpk.go.id. Diakses Pada 1 Mei 2024 Pukul 14:20 WIB.

¹⁶ Winnie Thalia, *Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. Skripsi.(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makassar).hlm. 11

menunjukkan pada taraf tercapainya hasil yang senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun ada perbedaan di antara keduanya.¹⁷

Efektivitas suatu program yang dilakukan oleh suatu organisasi atau kelompok didefinisikan sebagai korelasi antara output atau apa yang telah dicapai dengan hasil yang sebenarnya dicapai selama proses perencanaan sehingga hasilnya sesuai dengan harapan berimplikasi pada capaian ataupun hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁸

Sondang P. Siagian menyatakan bahwa efektivitas didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar sebelumnya ditentukan dalam menghasilkan suatu barang atas jasa dari aktivitas yang dilakukannya. Dalam buku “Efektivitas Organisasi” Menurut Duncan mengutip dari Richard M Steers mengungkapkan ukuran efektivitas adalah sebagai berikut ;

1. Pencapaian Tujuan

Keseluruhan upaya untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai proses. Oleh karena itu, pentahapan diperlukan untuk membuat pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, baik dalam hal pencapaian bagian-bagiannya maupun dalam hal periodisasi. Terdapat dua komponen dalam pencapaian tersebut: waktu dan sasaran, yang merupakan target kongkrit.

¹⁷ Olivia Kawowode dkk. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No.55 2018. Hal 3

¹⁸ Salma Banna Kadang dkk, *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso*. Jurnal Administrasi Publik, Vol VII No. 103, 2021 Hal. 89

2. Integrasi

Integrasi merupakan tolok ukur terhadap tingkat kesanggupan organisasi mengacu pada proses sosialisasi dan pengembangan konsensus.

3. Adaptasi

Adaptasi yang dimaksud dalam pengertian ini merupakan kemampuan sebuah organisasi untuk mengadaptasi dengan lingkungannya. Dalam hal kesesuaian program dengan kondisi lapangan.¹⁹

2. Faktor Penghambat Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "penghambat" berarti "hal, situasi, atau faktor lain yang menghambat" (merintang, menahan, menghalangi). Namun, hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi seseorang untuk bergerak maju atau mencapai suatu tujuan.²⁰ Dapat diartikan dari hal tersebut bahwasanya faktor penghambat ialah sesuatu yang mempengaruhi pengimplementasian suatu hal, seperti pengaruh yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal yang terbatas atau justru melimpahi konsekuensi yang kurang menguntungkan terhadap suatu hal.

Faktor penghambat kerap muncul dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa, serta dalam penyusunan

¹⁹ *Op.cit* Olivia Kawawode, Hal 3

²⁰ <https://id.scribd.com/document/336674608/Pengertian-Hambatan-Menurut-Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia-Tutorial> Diakses pada 2 mei 2024, Pukul 09:20 WIB

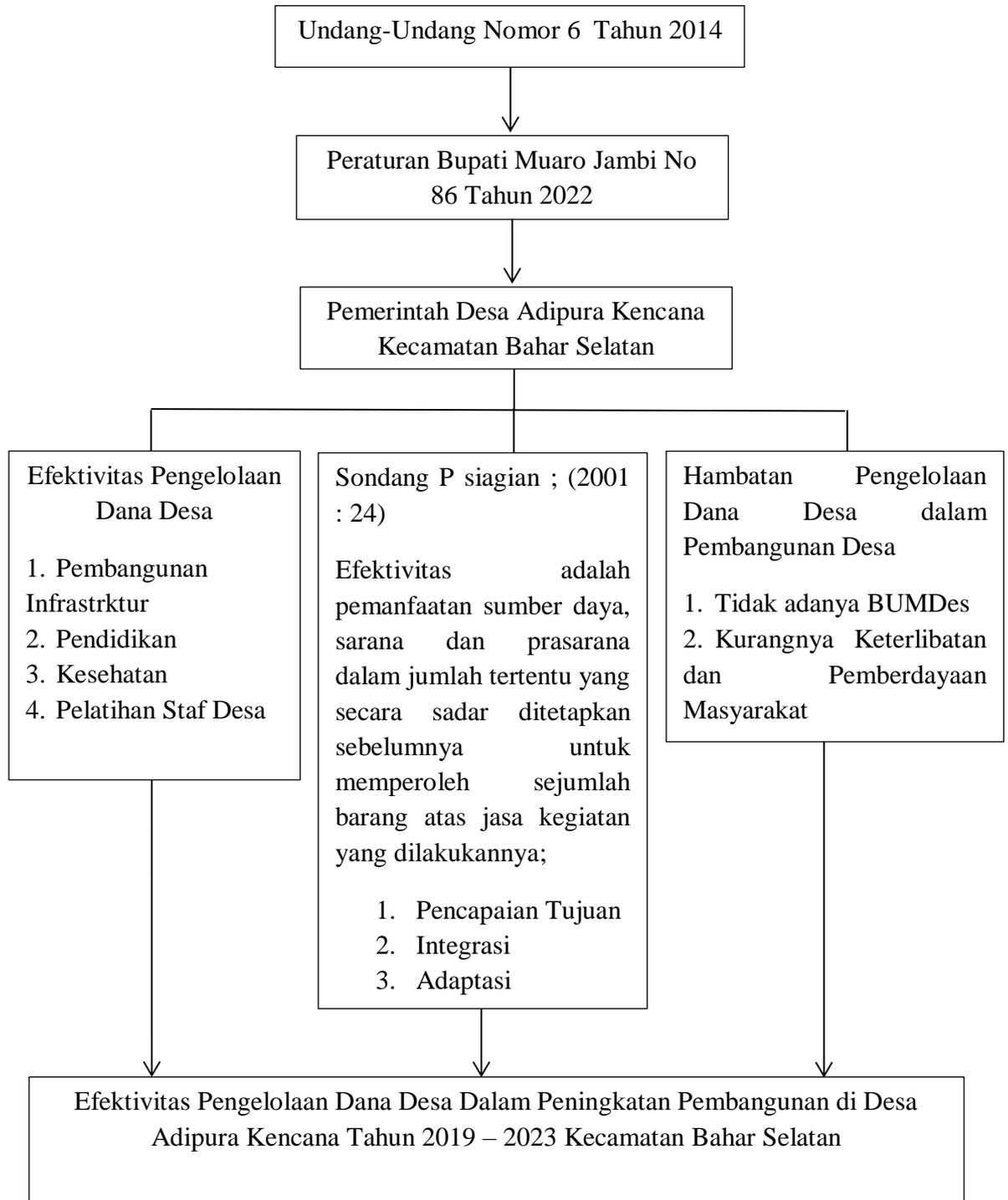
pertanggungjawabannya sekalipun. Sehingga hal tersebut menjadi katalisator untuk proses pembangunan yang tidak sempurna. Pembangunan pada prinsipnya merupakan suatu rangkaian tindakan maupun usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara terstruktur yang memiliki tujuan mencapai suatu kondisi yang lebih baik daripada situasi saat ini. Penting untuk diketahui bahwa pembangunan ini merupakan suatu evolusi yang harus berlangsung secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki masyarakat dan masalah utamanya.

Dalam konteks pembangunan kerap terdapat berbagai persoalan umum sering terjadi yang dihadapi oleh desa, masalah tersebut memerlukan tindakan antisipatif, termasuk ;

- a. Keterbatasan SDM yang berkualitas : kurangnya tenaga kerja memiliki kualitas secara professional di desa sehingga menjadi persoalan yang dihadapi
- b. Keterbatasan sumber dana yang tersedia : masalah keuangan juga menjadi hal terpenting pada pembangunan, baik yang tersedia dari internal desa maupun eksternal dalam mendukung pembangunan.
- c. Kurangnya kelembagaan sosial ekonomi yang efektif : dimana kelembagaan ditingkat desa perlu diperkuat guna dapat berperan dalam mengelola pembangunan desa.
- d. Ketidakjelasan system dan regulasi : keharusan untuk memiliki system yang jelas dan peraturan yang tegas dalam mengatur sebuah proses pembangunan di desa.
- e. Kurangnya inspirasi dan kontribusi dari masyarakat : partisipasi masyarakat yang perseptif serta pragmatis dan kreativitas yang kurang optimal menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan desa.²¹

²¹ Ferdy Nur Dzikri. Skripsi. “ *Efektivitas Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin*” (Jambi : Universitas Jambi, 2023) Hal 18

G. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Sejalan dengan kerangka berpikir diatas dapat diketahui bahwa dari UU No 6 Tahun 2014 mengenai Desa, mengatur bagaimana desa dalam pengelolaan dan mekanisme yang ada guna sebagai pengaturan dalam pembangunan melalui beberapa tahapan yang telah diatur didalamnya dengan ditindaklanjuti oleh Peraturan pemerintah kabupaten setiap tahunnya yang dalam hal ini melalui Peraturan Bupati (Perbup) Muaro Jambi Nomor 86 Tahun 2022 dalam mengelola atau membahas mengenai keuangan baik melalui pendapatan daerah maupun yang dianggarkan melalui pemerintah pusat yang ditujukan dana dan alokasinya kepada setiap desa yang ada terkhusus pada pemerintahan desa Adipura Kencana yakni salah satu desa berada di kecamatan bahar selatan kabupaten muaro jambi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori efektivitas beserta faktor penghambat yang ditemukan meliputi kualitas sumber daya aparatur, kebijakan peraturan, sarana dan prasarana penunjang operasional, partisipasi serta informasi. Dalam menjawab kedua rumusan masalah dalam penelitian ini maka digunakan indikator efektivitas dari Duncan yang dikutip Richard M Steers serta pembahasan pengelolaan. Hal tersebut ditujukan sebagai indikator terkait penilaian persoalan yang sedang diteliti.

Untuk mengetahui apakah pengelolaan mencapai tujuan dan berjalan dengan baik, perlu dilakukan pengukuran. Ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan membantu meningkatkan pembangunan desa. Dalam penelitian tentang efektivitas yang diperuntukkan, penelitian ini mempertimbangkan hubungan antara

keadaan yang nyata dan yang diharapkan saat menetapkan tujuan. Oleh karena itu, adanya suatu tujuan atau keadaan yang sesuai dengan harapan adalah yang paling penting, dan juga merupakan langkah atau proses dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis untuk menggambarkan kondisi lapangan yang sebenarnya.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yang berarti mengetahui dan menggambarkan kenyataan tentang peristiwa yang diteliti sehingga lebih mudah mendapatkan hasil yang objektif. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan mencakup subjek dari berbagai kumpulan data, termasuk kasus, pengalaman pribadi, wawancara, dan visual. Hasilnya dimasukkan ke dalam analisis dengan memberikan pemahaman

2. Lokasi Penelitian

Peneliti akan menemukan informasi tentang subjek penelitian dengan mengungkap keadaan sebenarnya di lokasi penelitian. Area studi ini terletak di Kabupaten Muaro Jambi. Studi ini dilakukan di Desa Adipura Kencana di Kecamatan Bahar Selatan.

3. Fokus Penelitian

Peneliti memilih untuk memfokuskan penelitian mereka pada Desa Adipura Kencana dengan berkonsentrasi pada cara pengelolaan dana desa dialokasikan untuk peningkatan pembangunan. Data yang digunakan meliputi Periode 2019-2023.

4. Sumber Data

Sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini dievaluasi berdasarkan tingkat kualitasnya. Sumber-sumber ini dibagi menjadi kategori primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari wawancara dan termasuk catatan lapangan dan visual dari informan yang memiliki hubungan langsung dengan penelitian. Dengan demikian, data ini diproses lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman peneliti.
- b. Data sekunder merupakan data yang terdapat di dokumen, publikasi, atau bahan yang diperoleh dari sumber kepustakaan.

5. Teknik Penentuan Informan

Untuk memilih informan, peneliti menggunakan sampel yang bertujuan atau purposive sampling. Informan yang dipilih adalah mereka yang memahami atau memahami bidang yang diteliti.²² Jadi, informan digunakan dalam penelitian ini tentang seberapa efektif pengelolaan dan

²² Suryadi Saputra B. Skripsi. *"Efektivitas Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Jambi Timur"*. (Jambi : Universitas Jambi, 2021) Hal 24

alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa Adipura Kencana, Meliputi ;

Tabel 1.3 Informan Desa Adipura Kencana Kecamatan Bahar Selatan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Adipura Kencana, Kec. Bahar Selatan	1 orang
2	Kasi / KAUR (Kepala Urusan)	2 orang
3	Kadus (Kepala Dusun)	2 orang
4	Masyarakat Desa	4 orang
Total		9 Orang

6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan proses observasi, wawancara, dan kepustakaan dan dokumentasi untuk menemukan data. Sehingga data dapat digunakan sebagai bukti penelitian ini, ketiga hal tersebut sangat penting saat menggali informasi. Adapun penjelasan untuk ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut ;

a. Observasi

Sutrisno Hadi menjelaskan, observasi merupakan suatu rangkaian yang kompleks terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis, dengan proses ingatan dan pengamatan yang paling penting. Observasi digunakan ketika penelitian mencakup perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan tanggapan yang diamati tidak

terlalu besar. Instrumentasi membedakan observasi terstruktur dan tidak terstruktur.²³

b. Wawancara

Peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur untuk melakukan wawancara. Jenis wawancara ini lebih bebas dilakukan dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini, orang yang diwawancarai dimintai pendapat dan gagasan mereka, sehingga peneliti mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang dikatakan informan selama wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk membuka masalah secara lebih terbuka.²⁴

c. Dokumentasi

Kata "dokumentasi" berasal dari kata "dokumen", yang berarti "benda tertulis". Peneliti melihat dokumen tertulis seperti buku, majalah, catatan harian, notulen rapat, dokumen peraturan, dan sebagainya saat menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini mengumpulkan data dari gambar dan foto yang berisi bukti dan laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan pembangunan Desa Adipura Kencana, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R n*, (Bandung : Alfabeta, 2017) Hal 145.

²⁴ **Ibid**, Sugiyono Hal 233

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data kualitatif digunakan. Hasil temuan atau hasil penelitian berasal dari pencarian dan penemuan tema, pola, konsep, insight, dan pemahaman dalam analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif berarti mengolah data, mengorganisir, mengatur, dan menafsirkan data untuk menghasilkan pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan baru. Di mana analisis dan penafsiran selalu berhubungan satu sama lain.²⁵

Metode deskriptif analitik digunakan. Peneliti mengolah data yang telah dikumpulkan dan kemudian menganalisisnya berdasarkan kondisi di lapangan dengan menggunakan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga hal:

a. Reduksi Data

Peneliti dapat memilah dan memilih data mana yang akan dipertajam penjelasannya dengan melakukan reduksi data, yang didefinisikan sebagai proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang ditemukan dalam catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disusun sehingga mungkin untuk membuat kesimpulan dan tindakan.

Penelitian ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tabel dan

²⁵ DR. J. R, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. (Jakarta : Grasindo, 2010) Hal 121.

grafik. Selain itu, data disajikan dalam bentuk uraian singkat dan sejenisnya, sehingga peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan bagaimana memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa di Desa Adipura Kencana.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi dan penarikan kesimpulan, atau penarikan arti dari data yang ditampilkan, adalah tahap akhir dari proses pengumpulan data. Beberapa metode yang digunakan termasuk pencatatan dan pengelompokan data secara sesuai. Oleh karena itu, hasil dari penelitian kualitatif mungkin menjawab masalah yang diajukan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena, seperti yang disebutkan sebelumnya, penelitian ini mungkin terus berkembang dikemudian hari.

8. Triangulasi Data

Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang sering digunakan melalui pemeriksaan. Triangulasi, menurut Denzin, adalah metode pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber adalah proses membandingkan dan mengevaluasi tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui berbagai alat dan waktu. Hal ini dapat dicapai melalui;

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat pandangan seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²⁶

²⁶ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2017) Hal 30.